

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan proses terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Fokus utama dalam kajian ekonomi pembangunan terletak pada upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka, khususnya yang sedang berada dalam tahap pembangunan dan menghadapi tantangan berupa kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, serta keterbelakangan di berbagai bidang kehidupan (Amsari et al., 2024).

Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga harus mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menilai tiga aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu kesehatan dan umur panjang, tingkat pengetahuan, serta ekonomi atau standar hidup layak. Peningkatan pada ketiga aspek tersebut dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya, terdidik, dan sehat secara menyeluruh.

Menurut data pada Badan Pusat Statistik (BPS) IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun

sebelumnya yang sebesar 74,39. Meskipun nilai IPM Indonesia secara nasional terus meningkat, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan. Kota Bandung mencatat IPM yang jauh lebih tinggi, yaitu 83,75 pada tahun 2024. Angka ini menempatkan Kota Bandung dalam kategori IPM sangat tinggi, yang menunjukkan kualitas kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan penduduk yang baik. Namun kesenjangan masih terlihat pada wilayah-wilayah penyangga atau kabupaten di sekitarnya, sebagai contoh Kabupaten Bandung mencatat IPM tahun 2024 sebesar 74,59. Perbedaan signifikan antara IPM Kota Bandung (83,75) dan Kabupaten Bandung (74,59) menunjukkan belum meratanya kualitas hidup dan standar kesejahteraan masih menjadi pokok persoalan, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kesenjangan kesejahteraan antarwilayah tersebut masih menjadi tantangan yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan disparitas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menunjukkan ketimpangan dalam distribusi kesempatan ekonomi. Kondisi tersebut mengharuskan adanya intervensi kebijakan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang tidak semata difokuskan pada pemenuhan gizi, melainkan juga dirancang untuk menghadirkan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal (Made et al., 2024). Program ini berpotensi menjadi instrumen ekonomi yang mampu

memperluas kesempatan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

Implementasi program ini juga diperkuat dengan dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menegaskan komitmen negara dalam mengelola kebijakan gizi secara terintegrasi. Disamping itu kebijakan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui penciptaan lapangan kerja baru, program MBG secara langsung berkontribusi dalam mewujudkan hak-hak ekonomi masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan secara operasional dijalankan melalui unit yang dinamakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG merupakan unit layanan yang berfungsi esensial sebagai dapur umum terstandar, bertanggung jawab penuh dalam memproduksi, mengelola, serta mendistribusikan makanan bergizi sesuai dengan standar baku yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, unit ini memiliki fleksibilitas untuk dikelola oleh berbagai entitas di tingkat lokal, seperti badan usaha, koperasi, yayasan, maupun lembaga sosial yang menjadi mitra pemerintah. Dengan demikian SPPG tidak hanya menjamin kualitas gizi yang tersalurkan kepada penerima manfaat, tetapi juga menjadi simpul penting dalam rantai operasional yang terdesentralisasi dan berbasis komunitas.

Lebih dari sekadar dapur umum, keberadaan SPPG memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui mekanisme pasar tenaga kerja. Operasional SPPG dengan kapasitas produksi yang besar menciptakan permintaan turunan (*derived demand*) akan faktor produksi tenaga kerja baru yang melibatkan berbagai posisi seperti juru masak, tim pengemasan, tim kebersihan, ahli gizi, dan staf akuntansi. Proses penyaluran makanan kepada penerima manfaat juga memerlukan pengelolaan logistik yang masif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SPPG memberikan dampak langsung (*direct effect*) berupa terbukanya kesempatan kerja (*direct employment*) bagi masyarakat sekitar. Kesempatan kerja tersebut selanjutnya menghasilkan stimulus pendapatan bagi tenaga kerja, yang secara bertahap mentransformasikan struktur ekonomi masyarakat dari sektor informal menuju formal yang lebih stabil.

Pendapatan rutin yang diterima oleh tenaga kerja tersebut kemudian digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga menciptakan sirkulasi modal di masyarakat. Dalam perspektif makroekonomi Keynesian, proses pengeluaran konsumsi yang berulang inilah yang memicu mekanisme *multiplier effect*. Dampak lanjutan yang muncul akibat beredarnya kembali upah pekerja melalui aktivitas konsumsi lokal ini disebut sebagai efek ikutan (*induced effect*). Keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai produksi SPPG memperlihatkan bahwa program ini secara efektif memperkuat ekonomi mikro melalui partisipasi langsung. Peningkatan penghasilan pekerja berujung pada peningkatan daya beli agregat di tingkat

lokal, yang kemudian merangsang pertumbuhan sektor-sektor penunjang di wilayah tersebut seperti jasa dan perdagangan non-pangan (Dwijayanti, 2024).

Berdasarkan pengamatan awal, operasional SPPG Rancabolang Gedebage telah menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja lokal sebagai dampak langsung (*direct effect*) program. Sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau menganggur kini terlibat aktif dalam berbagai lini operasional SPPG. Namun demikian, secara ilmiah belum diketahui sejauh mana kesempatan kerja langsung tersebut mampu menghasilkan dampak ekonomi lanjutan (*induced effect*) yang optimal. Diperlukan analisis mendalam untuk mengukur bagaimana variasi pola konsumsi masyarakat, hasrat konsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume*), dan tingkat kebocoran ekonomi wilayah (*Marginal Propensity to Import*) memengaruhi total perputaran ekonomi lokal di Kecamatan Gedebage.

Fenomena ekonomi sirkular yang muncul akibat dampak ganda program ini dapat dijelaskan secara komprehensif melalui teori *multiplier effect*. Konsep ini menggambarkan bagaimana pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) untuk program gizi secara simultan menghasilkan dampak ekonomi berlapis melalui sirkulasi pendapatan di tingkat lokal. Injeksi awal berupa pembayaran upah tenaga kerja akan menambah pendapatan masyarakat, yang berikutnya mendorong peningkatan konsumsi di sektor lainnya (Investopedia, 2024). Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah tidak hanya menciptakan nilai ekonomi langsung, tetapi juga efek tidak langsung (*indirect effect*) pada rantai pasok dan efek ikutan (*induced effect*) terhadap kesejahteraan masyarakat

sekitar (Uhud Darmawan Natsir, Nurul Fadilah Aswar, 2025). Dalam penelitian ini, *multiplier effect* diletakkan sebagai pisau analisis untuk mengukur bagaimana kesempatan kerja langsung yang diciptakan oleh SPPG mampu bertindak sebagai *engine of growth* yang menstimulasi pendapatan dan kesempatan kerja tidak langsung di sektor ekonomi sekitarnya.

Untuk menganalisis dampak tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini tidak hanya menggunakan perspektif ekonomi, tetapi juga perspektif ekonomi syariah melalui pendekatan *maqashid syariah*. Pendekatan ini menjadi penting mengingat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak luput dari berbagai sorotan. Meskipun program ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul kritik bahwa sebagian pekerjaan yang tercipta masih didominasi sektor informal serta disertai sorotan mengenai tingkat upah dan kualitas pekerjaan yang diterima tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga perlu dinilai apakah pekerjaan yang tercipta telah memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi pekerja (Oswaldo, 2025).

Oleh karena itu kerangka analisis penelitian ini diletakkan dalam perspektif *maqashid syariah*, yaitu konsep yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada tercapainya tujuan syariat (*maqashid syariah*). Konsep ini memuat lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-*

mal). Namun penelitian ini memfokuskan analisis pada dua dimensi yang paling relevan dengan tujuan penelitian, yaitu *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*, karena kedua aspek tersebut berkaitan langsung dengan penciptaan serta meningkatkan kualitas kesempatan kerja dan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh SPPG.

Penelitian ini memaknai *hifz an-nafs* sebagai upaya menjaga jiwa melalui tersedianya pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat bagi masyarakat yang terlibat dalam operasional SPPG. Analisis ini menjadi penting untuk melihat apakah kesempatan kerja yang tercipta benar-benar memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup pekerja, menciptakan rasa aman dalam bekerja, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menilai adanya penyerapan tenaga kerja, tetapi juga kualitas manfaat yang diterima pekerja sebagai wujud perlindungan jiwa dalam perspektif syariah. Sebagaimana firman Allah SWT:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya: "...barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." (QS. Al-Ma'idah: 32).

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk upaya yang menjaga keberlangsungan hidup manusia, termasuk memberikan akses terhadap pekerjaan yang layak dan penghidupan yang stabil, dipandang sebagai kontribusi nyata dalam perlindungan jiwa sehingga sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam *maqashid syariah*.

Pada aspek *hifz al-mal*, penelitian ini memaknainya sebagai perlindungan terhadap harta melalui pendapatan yang diperoleh tenaga kerja secara halal, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Analisis ini penting untuk menilai apakah pendapatan yang dihasilkan dari keberadaan SPPG tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pekerja, tetapi juga mampu mendorong distribusi manfaat ekonomi dan perputaran ekonomi lokal sebagai bagian dari kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu untuk dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya memperoleh dan mengelola harta secara halal, adil, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memandang bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur hanya dari jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap. Lebih penting lagi, perlu dianalisis apakah kesempatan kerja tersebut mampu menghasilkan dampak ekonomi lanjutan (*multiplier effect*) melalui peningkatan pendapatan, konsumsi masyarakat, dan perputaran ekonomi lokal, serta apakah keseluruhan proses tersebut telah mencerminkan kemaslahatan sebagaimana tujuan *maqashid syariah*. Hingga saat ini, kajian yang menghubungkan *multiplier effect* SPPG terhadap kesempatan kerja dengan perspektif *maqashid syariah* masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi SPPG Gedebage Rancabolang untuk mengetahui apakah dampak ekonomi yang dihasilkan telah sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian terdahulu mendukung hubungan antara program sosial dan peningkatan kesejahteraan. Fadhila dan Hanri (2025) membuktikan bahwa program pendampingan UMKM di DKI Jakarta mampu meningkatkan ketahanan pendapatan dan mempertahankan tenaga kerja. Sementara Puspa Indah Sari Pohan et al. (2024) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur seperti PLTA Batang Toru berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Meskipun berbagai studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Fadhila dan Hanri (2025) serta Puspa Indah Sari Pohan et al. (2024), telah konsisten menunjukkan hubungan positif antara implementasi program pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang berfokus secara spesifik pada SPPG sebagai instrumen kebijakan baru dalam tata kelola gizi nasional masih sangat terbatas. Penekanan studi yang ada umumnya masih bersifat makro atau pada program pemberdayaan UMKM secara umum, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan menempatkan tenaga kerja sebagai unit analisis utama guna melihat efektivitas kebijakan gizi dalam menciptakan stabilitas ekonomi rumah tangga melalui kacamata *maqashid syariah*. Penting untuk dilakukan penelitian yang secara mendalam menelaah bagaimana SPPG Rancabolang Gedebage berkontribusi terhadap kesempatan

kerja serta bagaimana dampak ekonomi tersebut divalidasi dalam kerangka tujuan Islam.

Kajian ini akan membantu memahami secara kritis apakah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam dapat dilihat melalui manfaat ekonomi yang dihasilkan dari program pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kajian literatur mengenai Ekonomi Islam terapan, terutama dalam konteks kebijakan sosial yang memiliki aspek ekonomi. Analisis terhadap SPPG dapat menjadi contoh kasus konkret (*case study*) bagaimana prinsip syariah dapat diimplementasikan dan menjadi dasar evaluasi dalam kebijakan publik kontemporer untuk mencapai kesejahteraan umat secara komprehensif.

Temuan ini dapat memberikan masukan yang terukur dan berorientasi nilai bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan SPPG, memperluas partisipasi masyarakat lokal, dan memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan. Pendekatan yang berorientasi pada *maqashid syariah* ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih manusiawi, beretika, dan berkelanjutan, memastikan bahwa program pemerintah tidak hanya berhasil secara kuantitas tetapi juga bermakna secara kualitas etis (Rozalinda, 2019).

Berdasarkan latar belakang, urgensi masalah, dan *research gap* yang telah diuraikan maka penelitian ini berjudul **“Multiplier Effect Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terhadap Kesempatan Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus SPPG Rancabolang Gedebage)”**. Penelitian

ini dilaksanakan untuk menilai sejauh mana program SPPG mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, serta bagaimana dampak tersebut dinilai dari mata *maqashid syariah* pada aspek *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang terlihat adanya inisiatif pemerintah melalui SPPG Rancabolang Gedebage, serta adanya kebutuhan validasi etis, maka ditemukan beberapa masalah yang relevan untuk dikaji:

1. Belum terukurnya secara empiris *multiplier effect* SPPG terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di wilayah Rancabolang Gedebage.
2. Diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi dampak ekonomi dari SPPG tersebut ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam kaitannya dengan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan keadilan distribusi harta (*hifz al-mal*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian agar relevan dan langsung menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Rancabolang Gedebage, dengan subjek terbatas pada pekerja lokal SPPG.

2. Evaluasi terhadap dampak ekonomi tersebut hanya ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, dimensi *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *multiplier effect* Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rancabolang Gedebage terhadap penciptaan kesempatan kerja masyarakat lokal?
2. Bagaimana dampak ekonomi SPPG Rancabolang Gedebage ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, pada aspek *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan *multiplier effect* Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rancabolang Gedebage terhadap penciptaan kesempatan kerja masyarakat lokal.
2. Menganalisis dan mengevaluasi dampak ekonomi SPPG Rancabolang Gedebage ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, pada aspek *hifz al-mal* dan *hifz an-nafs*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur mengenai konsep *multiplier effect* dalam konteks implementasi kebijakan sosial-ekonomi pemerintah. Kontribusi spesifiknya terletak pada pengukuran efek berantai program gizi melalui SPPG terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dua aspek fundamental *maqashid syariah* yaitu *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-mal* (memelihara harta), dapat diwujudkan dan diukur keberhasilannya secara empiris melalui sebuah program kebijakan publik yang terintegrasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah/Pengelola Program

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris mengenai efektivitas program dalam menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas operasional SPPG. Selain itu kajian ini juga diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dua aspek fundamental *maqashid syariah* (*hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*) dapat dioperasionalkan sebagai indikator keberhasilan evaluasi kebijakan publik.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang memuat urgensi program gizi dan kesenjangan ekonomi lokal, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, ruang lingkup dan pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teoritis yang di fokuskan pada 4 poin yaitu, konsep *multiplier effect*, kesempatan kerja, *maqashid syariah*, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bab ini diakhiri dengan tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu dan penyusunan kerangka berpikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan, jenis, dan desain penelitian yang digunakan. Bagian ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, penentuan subjek dan objek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data temuan di lapangan mengenai operasional SPPG di Rancabolang Gedebage, analisis kualitatif terhadap penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk pihak-pihak terkait dan pengembangan kajian teoritis selanjutnya.

